

ALASAN DIBALIK KEBIJAKAN IMPOR PANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA

Paulina Ruth Tarigan¹

Ikomatussuniah S.H., M.H., PhD²

E-mail : paulinatrgnnn@gmail.com

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Indonesia

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi titik vital bagi suatu negara, hal ini karena pangan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan hidup warga negaranya. Dalam hal ini, ketahanan pangan menjadi penentu kualitas suatu negara dan cerminan keberhasilan negara dalam pembangunannya. Ketahanan pangan merupakan situasi terwujudnya pangan yang cukup bagi setiap orang, baik itu dalam hal jumlah, maupun keragamannya, kualitasnya, dan kemudahan aksesnya, untuk dapat menjalankan hidup yang sehat dan produktif.¹ Pangan merupakan hak setiap warganegara yang wajib dilindungi oleh negaranya, terutama masyarakat yang terhambat secara ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan pangan warga negaranya, Indonesia mengandalkan sektor pertanian, mengingat julukannya sebagai negara agraris. Alasan dibalik julukan negara agraris yang melekat di Indonesia dikarenakan Indonesia terkenal akan lahan pertaniannya yang luas dan subur. Bahkan sektor agraris sudah menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang hingga kini. BPS mencatat bahwa komposisi masyarakat berdasarkan lapangan pekerjaannya, pada Februari 2023 didominasi oleh subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 29,36% dari jumlah penduduk yang bekerja.² Terlebih lagi, selama tahun 2018-2021 subsektor pertanian menunjukkan berkontribusi terhadap PDB Indonesia yakni sebesar 13,70% pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan menjadi

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

² Nabilah Muhamad, Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Pekerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/16/penduduk-bekerja-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-pertanian-kehutanan-dan-perikanan>, diakses pada tanggal 5 April 2024

13,28% pada tahun 2021.³ Iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan setiap tahunnya.

Fakta menunjukkan bahwasanya, negara agraris tidak menjamin suatu negara memiliki indeks ketahanan pangan yang tinggi. Berdasarkan data GFSI (*Global Food Safety Initiative*), Singapura menjadi negara dengan indeks ketahanan pangan terkuat yang ada di Asia Tenggara. Singapura mencatat poin sebesar 73,1 poin di tahun 2022. Poin ini dihitung berdasarkan 4 parameter yang telah ditetapkan oleh GFSI, yakni ketersediaan dari segi jumlah (*availability*), harga yang tidak memberatkan rakyat (*affordability*), aman dan bergizi (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*).⁴ Sementara itu Indonesia, menempati peringkat ke-4 dengan skor 60,2 atau peringkat 63 dari 113 negara.⁵ Ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2022 dinilai rendah dibandingkan rata-rata global yang indeksnya berada pada poin 62,2.

Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia berupaya keras dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang pangan dalam mengatasi isu pangan, dan tentunya pemerintah juga harus bersiap dalam menghadapi peningkatan kebutuhan pangan seiring pertumbuhan angka jumlah penduduk. Kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan antara lain; menyelenggarakan manajemen cadangan pangan pemerintah, penyediaan pasokan pangan yang berfungsi untuk keseimbangan harga dan jumlah, pengendalian mutu dan keamanan pangan, melaksanakan stabilisasi harga pangan, serta melakukan perbaikan terhadap daerah yang rentan pangan. Kemudian, sebagai negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia pun ikut serta menjalankan program SDGs (*Sustainable Development Goals*). Agenda ini merupakan komitmen internasional dan juga nasional, dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang mencakup 17 tujuan.⁶ Tujuan utama dari SDGs yakni, menuntaskan

³ Sabarella dkk, *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022* (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2022), hal.14

⁴ Aulia Mutiara Hatia Putri, Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia! <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

⁵ Kementerian Kominfo, Ketahanan Pangan Penting Menjadi Perhatian ASEAN, <https://asean2023.id/id/news/food-security-an-aseans-priority#:~:text=Menurut%20data%20Global%20Food%20Security,yang%20tertinggi%20di%20Asia%20Tenggara>, diakses pada tanggal 8 April 2024

⁶ SDGs Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, SDGs Indonesia, <https://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses pada 8 April 2024.

kekurangan pangan, menggapai ketahanan pangan dan pemerataan gizi yang lebih baik, serta menyokong program pertanian yang berkelanjutan.

Upaya lain yang diusahakan oleh pemerintah adalah impor pangan. Impor Pangan adalah usaha memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.⁷ Badan Pusat Statistik selaku lembaga non-pemerintah yang bertugas melaksanakan survei statistik mencatat jumlah impor pangan yang semakin meningkat setiap tahunnya, terutama pada beras, gula, daging, dan jagung. Beras sebagai komoditas dengan jumlah impor terbanyak telah menetapkan rekor tertingginya selama 5 tahun terakhir, yakni sebanyak 3,06 juta ton pada tahun 2023. Impor beras yang dilakukan Indonesia sebagian besar berasal dari Thailand, yakni sebanyak 1,38 juta ton, selanjutnya dari Vietnam sebanyak 1,14 juta ton, disusul oleh Pakistan sebanyak 309 ribu ton, Myanmar 141 ribu ton, dan dari negara tetangga lainnya sebanyak 83 ribu ton. Persentase aktivitas impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kenaikan secara fantastis mengingat tahun lalu Indonesia hanya mengimpor beras sebanyak 429 ribu ton atau naik sebesar 613,61%. Bahkan pada awal 2024, Indonesia kembali mencatat kenaikan impor beras yakni sebanyak 880.820 ton pada bulan Januari-Februari 2024. Dibandingkan tahun lalu, volume kenaikan impor beras meningkat sebanyak 93% pada Januari dan 148,63% pada bulan Februari. Impor beras yang dilakukan oleh pemerintah secara masif ini terjadi akibat perubahan iklim yang mengguncang panen di Indonesia pada awal tahun 2024. Kenaikan harga pangan yang mengancam masyarakat memicu penurunan daya beli masyarakat dan mengancam ketahanan pangan Indonesia. Tercatat inflasi harga pada tahun 2024 sebesar 8,47%, meningkat drastis dari titik tertinggi sebelumnya, yakni pada oktober 2022 yang mencapai kenaikan sebesar 7,22%.⁸

Impor beras 2024 yang direncanakan pemerintah diperkirakan akan mencapai 3 juta sampai 4 juta ton sehingga mencetak rekor terbaru dalam sejarah impor pangan Indonesia. Kebijakan impor pangan memang berdampak positif terhadap pemenuhan cadangan pangan nasional dan pengendalian harga beras di Indonesia, namun

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (25) tentang Pangan.

⁸ Martha Herlinawati Simanjuntak, Ekonom: Kenaikan Harga Pangan Dorong Penurunan Daya Beli Masyarakat, <https://www.antaraneews.com/berita/4018110/ekonom-kenaikan-harga-pangan-dorong-penurunan-daya-beli-masyarakat>, diakses pada 8 April 2024.

dampaknya terhadap petani di Indonesia perlu diperhitungkan. Sebagai negara agraris, sejumlah masyarakat Indonesia menggantungkan dirinya terhadap sektor pertanian. Maka persoalan ini juga harus menjadi atensi pemerintah, agar para petani di Indonesia tidak mengalami gangguan, baik itu secara ekonomi maupun sosial yang kemudian menyebabkan kebangkrutan. Isu ini menjadi dorongan bagi penulis untuk mengungkap alasan dibalik impor pangan yang dilakukan di Indonesia serta dampaknya terhadap petani-petani yang ada di Indonesia.

PEMBAHASAN

Alasan dibalik Impor Pangan yang dilakukan Indonesia

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi, pengelolaan impor dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan.⁹ Kemudian alasan lebih lanjut dibalik impor pangan yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Tingginya ancaman dari alam yang sulit dihindari

Dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan setiap individu atas pemenuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari, terutama meningkatkan hasil produksi pertanian dalam sektor pangan, masih banyak tantangan yang menghambat produksi pangan. Sejumlah hambatan yang ditemukan tersebut, ada yang dapat diminimalisir melalui rekayasa teknologi, namun ada pula yang sangat sulit ditangani, terutama yang berkaitan dengan kejadian fenomena alam yakni perubahan iklim.

Perubahan (*climate changes*) adalah gejala alam yang disebabkan oleh transisi jumlah dari elemen-elemen iklim, baik itu secara alamiah maupun artifisial, yang dipercepat oleh setiap produktivitas manusia di bumi. Perubahan iklim dan cuaca secara drastis dapat mengakibatkan peningkatan suhu dan permukaan air laut, serta perubahan iklim secara tidak teratur. Contohnya, peristiwa El-Nino yang dijumpai dengan musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya, serta La-Nina dengan musim hujan yang lebih panjang atau sebaliknya. El Nino merupakan fenomena iklim alam ketika suhu permukaan laut di pasifik timur tropis naik sehingga mengakibatkan penurunan curah

⁹ Fauzin, *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan* Vol. 14 No. 1, Jurnal PAMATOR, 2021, hlm.3

hujan, sedangkan La Nina adalah sebaliknya, fenomena iklim alam yang menyebabkan suhu global turun dari biasanya.

Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena berimbas pada pola tanam, periode tanam, kualitas dan hasil tanaman pangan. Lembaga penelitian padi Filipina melaporkan bahwa, kenaikan suhu sebesar 10 derajat celcius berdampak pada penyusutan panen padi sebanyak 10%.¹⁰ Perubahan iklim juga berpengaruh terhadap peningkatan harga pangan di pasar yang memerosotkan daya beli masyarakat. Jika hal ini terjadi, masyarakat yang kurang mampu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan stabilitas ekonomi dapat mengalami gangguan. Ketahanan pangan yang dicita-citakan pun akibatnya dapat terganggu. Kegagalan panen di Indonesia pada awal 2024 merupakan contoh dampak perubahan iklim terhadap pangan dan perekonomian negara. Di tengah hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan impor beras dari negara tetangga untuk menstabilkan harga beras di pasar dan memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat.

2. Jumlah lahan pertanian yang semakin berkurang tiap tahunnya

Perubahan ahli fungsi lahan pertanian menjadi kawasan bisnis, industri, perumahan dan lainnya berpengaruh terhadap pangan di Indonesia. Badan Pertanahan Nasional selaku badan yang bertugas dalam penetapan dan penyusunan kebijakan di bidang pertanahan menyatakan, pada tahun 2021 lahan pertanian Indonesia mengalami penurunan sebesar 287 ribu hektar selama 7 tahun terakhir. Jika indeks panen padi yang mengalami peralihan fungsi lahan berada di angka 2,5-3% dengan produktivitas rata-rata 6 ton Gabah Kering Giling/hektar maka apabila diakumulasikan, dalam lima tahun lahan sawah yang beralih fungsi antara 300.000-400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi mencapai 1,8 juta ton-2.4 juta ton GKG.¹¹ Seiring berkembangnya zaman, lahan-lahan yang dulunya berfungsi sebagai lahan pertanian kini sudah banyak berubah. Bahkan di desa-desa, lahan pertanian disulap menjadi perumahan-perumahan warga. Hal ini memang menjadi suatu pertanyaan kompleks mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan diperlukan lahan-lahan permukiman sebagai tempat

¹⁰ Brida, Perubahan Iklim Mengancam Ketahanan Pangan, <https://brida.badungkab.go.id/artikel/52693-perubahan-iklim-mengancam-ketahanan-pangan>, diakses pada 9 April 2024.

¹¹ Aulia Mutiara Hatia Putri, Digilas Tol & Bandara, Petani RI Makin Krisis Lahan, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230919081946-128-473563/digilas-tol-bandara-petani-ri-makin-krisis-lahan>, diakses pada 9 April 2024.

tinggal masyarakat. Sektor-sektor bisnis dan industri yang semakin luas dan modern juga didirikan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dikutip dari CNBC Indonesia, 3 faktor penyebab konversi lahan/ahli fungsi lahan di Indonesia disebabkan oleh:¹²

1. Pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian mengalami penurunan
2. Ketersediaan air irigasi untuk mengairi lahan pertanian mengalami penurunan
3. Hukum yang mengatur sistem pewarisan hak milik sawah memiliki ketumpulan dalam pelaksanaannya di realita sehingga para ahli waris lahan lebih memilih untuk menjual sawahnya.

Generasi muda di zaman ini lebih banyak untuk tidak memilih pekerjaan sebagai seorang petani karena stigma negatif yang dimiliki adalah “Petani berpenghasilan rendah”, orang-orang banyak memilih untuk menjual sawahnya kepada para pengusaha dengan harga yang lebih tinggi untuk dibangun kawasan bisnis. Pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah juga ikut berkontribusi terhadap penurunan jumlah lahan pertanian. Contoh kasus yang dapat dilihat yakni pembangunan tol Jogja-Solo di era pemerintahan Jokowi. Pembangunan tol tersebut dibangun diatas lahan pertanian yang masih aktif digunakan untuk mencapai ketahanan pangan. Pembangunan tol ini menyebabkan dampak secara sosial dan juga ekonomi kepada warga yang bekerja serta bertempat tinggal di wilayah pembangunan tol tersebut. Di satu sisi, pembangunan tol ini memang mempersingkat waktu tempuh dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perjalanan namun di sisi lain hal ini berimbas pada pengurangan lahan pertanian yang berfungsi memproduksi kebutuhan pangan daerah dan nasional. Seperti halnya, hilangnya saluran irigasi untuk menunjang persawahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, dan juga berkurangnya lahan produktif yang berfungsi menghasilkan pangan untuk masyarakat.¹³

Demikian hal ini menunjukkan masih diperlukan peran serta kebijakan pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat. Dinas pertanian dan peternakan harus menerapkan program-program pertanian yang efektif dan melindungi

¹² *Ibid.*

¹³ Anissa, dkk, “Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Jalan Tol (*Tax on Location*) dalam Pengaruh Ekosistem Lingkungan Lingkup Hukum Agraria”, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, hlmn.87.

para petani di Indonesia. Kemudian dinas fungsi tata ruang daerah juga harus memberikan solusi terkait pengelolaan kawasan yang dialihfungsikan agar tidak merugikan masyarakat setempat. Peraturan-peraturan ini diperlukan dan harus secara tegas agar kebutuhan masyarakat akan pangan tidak terancam dan jumlah produksinya menurun.

3. Implementasi penerapan teknologi baru di sektor pertanian masih belum optimal

Pengimplementasian teknologi dalam menunjang hasil produksi pertanian dinilai belum optimal. Prof. Dr. Ir. Tualar Simarmata, M.S., Guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwasanya kedaulatan pangan yang ingin dicapai Indonesia di tahun 2045 membutuhkan percepatan transformasi sektor pertanian yang awalnya berbasis sumber daya alam menuju inovasi.¹⁴ Lebih lanjut Prof. Tualar menjelaskan bahwa petani di Indonesia harus memiliki pola pikir yang modern dan digital. Hal ini berkaitan dengan, bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menunjang produktivitas pertanian sehingga petani Indonesia tidak perlu bekerja sangat keras dengan seluruh tenaganya di sawah. Saat ini, ada banyak inovasi terbaru terkait pertanian, namun pemikiran-pemikiran tersebut masih banyak yang belum direalisasikan di lapangan. Penyebab tertinggalnya petani Indonesia di era digitalisasi disebabkan oleh kesadaran teknologi yang masih rendah di kalangan petani. Rendahnya tingkat pendidikan petani yang rata-rata tingkat pendidikannya tamat SMP-SMA menyebabkan pertanian yang dilakukan di Indonesia masih bersifat tradisional. Hal ini juga dipengaruhi oleh rata-rata usia petani yang saat ini sudah tidak muda lagi, mayoritas berusia 45-54 tahun, disusul oleh petani yang berusia 35-44 tahun di posisi kedua, dan usia 55-64 tahun di posisi ketiga.¹⁵

Walaupun kini sudah lebih dari 40% dari jumlah petani di Indonesia menggunakan teknologi, namun angka ini harus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan pangan yang masif seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kepala Balai Besar Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Agung Prabowo mengungkapkan pemerintah saat ini menggencarkan mekanisasi namun sayangnya penggunaannya belum tepat guna dalam

¹⁴ Arief Maulana, Pakar Unpad: Transformasi Pertanian Indonesia Harus Berbasis Teknologi, <https://www.unpad.ac.id/2022/08/pakar-unpad-transformasi-pertanian-indonesia-harus-berbasis-teknologi/>, diakses pada 9 April 2024.

¹⁵ Arrijal Rachman, Potret Pertanian RI 10 Tahun Terakhir Minim Teknologi, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231204120654-4-494316/potret-pertanian-ri-10-tahun-terakhir-minim-teknologi>, diakses pada 9 April 2024.

hal jumlah dan pemetaan lokasinya¹⁶. Rekayasa alat mesin pertanian tidak boleh terpusat di daerah-daerah tertentu saja dan konsep teknologi yang diciptakan harus sesuai dengan kebutuhan pertanian baik yang berskala kecil maupun besar. Lebih lanjut, Agung mengungkapkan keuntungan yang didapat dari pertanian modern adalah penurunan tenaga kerja sebesar 69%, biaya produksi sebesar 31%, mengurangi susut hasil sebesar 68%, dan meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 10%.

Contoh yang dapat diambil yakni negara Jepang. Meskipun hanya 20% dari lahan negara yang cocok sebagai lahan produksi pangan, namun petani di Jepang menggunakan lahan secara efektif melalui pertanian modern. Sistem pertanian di Jepang sudah menggunakan teknologi pertanian berbasis tinggi seperti penggunaan robotik, otomatisasi sensor, dan kecerdasan buatan. Dalam melakukan tugas penanaman, panen, dan penyemprotan pestisida, petani Jepang mengandalkan kekuatan robotika. Jepang juga memiliki sensor dalam pemantauan pertumbuhan tanaman, iklim, keadaan tanah, manajemen irigasi, cuaca, dan manajemen pertanian. Hal ini memudahkan petani dalam memantau dan mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait kondisi pertaniannya.¹⁷ Pemerintah Jepang berupaya untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan dengan memanfaatkan pertanian berbasis sains dan teknologi. Kemandirian pangan dan swasembada pangan dinilai penting dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jepang. Pemerintah Jepang juga memberi dukungan finansial dan peningkatan infrastruktur di pedesaan Jepang untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor pangan.

Tentu bukan hal yang mudah bagi Indonesia untuk mewujudkan pertanian modern layaknya Jepang. Pemerintah Indonesia juga sudah berupaya dalam mengimplementasikan penggunaan teknologi pertanian modern, untuk meningkatkan produksi pangan lokal secara lebih efektif. Dengan terwujudnya pertanian yang modern, ketergantungan Indonesia terhadap kegiatan impor pangan dapat diminimalisir dengan mendorong produksi pangan lokal. Untuk itu, kebijakan pemerintah harus berpihak

¹⁶ Majalah Hortus Archipelago, Mekanisasi Pertanian Indonesia Masih Rendah Ini Penyebabnya, <https://news.majalahhortus.com/mechanisasi-pertanian-indonesia-masih-rendah-ini-penyebabnya/>, diakses pada 9 April 2024.

¹⁷ Andika Dwi Darma Putra, Membandingkan Sistem Pertanian di Jepang dan Indonesia, <https://www.agrofarm.co.id/2023/06/membandingkan-sistem-pertanian-di-jepang-dan-indonesia/>, diakses pada 9 April 2024.

pada pertanian modern dan juga diperlukan kemauan dari segenap petani di Indonesia dalam mendukung program ini.

Dampak Impor Pangan terhadap Petani di Indonesia

Kebijakan impor pangan di Indonesia memiliki dampak positif terhadap ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga pangan di pasar. Namun apakah hal ini juga berdampak positif terhadap petani di Indonesia? Penelitian yang dilakukan Rahim (2010) mendapati bahwa impor beras berdampak terhadap tingkat kesejahteraan petani yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP).¹⁸ BPS menjelaskan NTP (Nilai Tukar Petani) adalah rasio indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).¹⁹ NTP dapat digunakan sebagai parameter tingkat kesejahteraan petani, walaupun masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur hubungan antara NTP dan juga impor pangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara deskriptif oleh Martha&Robby (2018), impor pangan berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Hal ini juga sejalan dengan penemuan Rahmi dalam mengukur hubungan NTP dan juga impor pangan. Artinya, semakin banyak produk impor yang membanjiri pasar domestik, berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesejahteraan petani Indonesia. Namun dalam penelitiannya, Martha&Robby menjelaskan bahwa impor pangan tidak memiliki pengaruh secara signifikan yang menggerus nilai tukar pangan petani. Sama halnya dengan penurunan harga pangan domestik setelah kebijakan impor pangan. Penjelasan akan hal ini karena, kebijakan impor memang ditempuh untuk menutupi pasokan pangan domestik yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat domestik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kenaikan harga gabah kering panen (GKP) dan juga pangan global memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan nilai tukar petani. Artinya, apabila harga pangan global naik, maka akan menaikkan nilai tukar petani (NTP). Walaupun hasil penelitian menunjukkan impor pangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan petani, hal ini harus tetap menjadi konsentrasi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang dapat mengatasi

¹⁸ Martha Carolina dan Robby A Sirait, *Pengaruh Impor Pangan terhadap Kesejahteraan Petani Pangan*, Vol.3 No.2, Jurnal BUDGET, 2018, hlm.3.

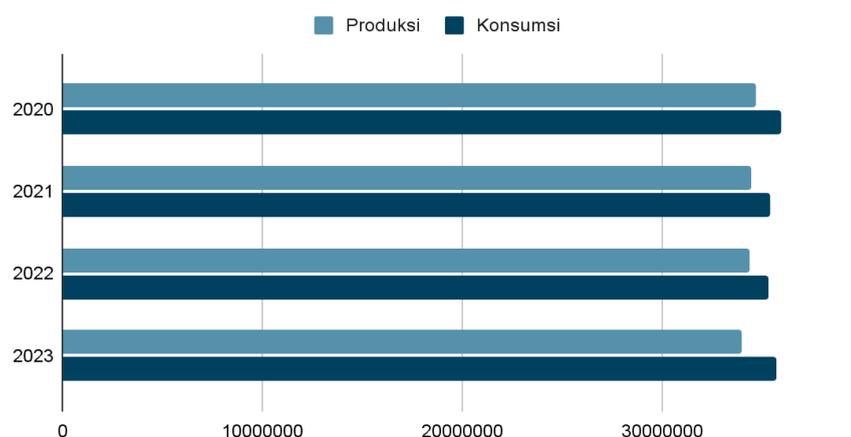
¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Agustus 2023*, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/09/01/1993/perkembangan-nilai-tukar-petani-dan-harga-produsen-gabah-agustus-2023.html> (diakses pada 10 April 2024).

derasnya aliran impor, serta mendukung petani Indonesia dalam meningkatkan hasil panen, guna mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan diartikan sebagai hak rakyat dan bangsa untuk menghasilkan pangan sendiri dan menetapkan sistem pangannya sendiri sementara kemandirian pangan diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghasilkan pangannya sendiri sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Dalam melindungi sektor pertanian dan juga bidang ekonomi lainnya, pemerintah telah menerapkan 3 kebijakan yakni; penetapan kuota impor, pengenaan tarif impor (bea masuk), dan pemberian hak monopoli impor atau pembatasan terhadap jumlah importir.²⁰ Bea masuk merupakan sumber pemasukan negara yang termasuk ke dalam kategori pajak tidak langsung. Jumlah bea masuk yang dikenakan nantinya akan digunakan untuk mendorong kenaikan harga produk. Selain itu, kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan pemasukan dan juga produksi dari petani, mengamankan harga dasar gabah yang telah dipatok oleh pemerintah, menstabilkan harga di dalam negeri, serta menekan anggaran negara untuk menstabilkan harga.

Produksi beras mengacu pada pola tanam, sedangkan konsumsi beras akan terus stabil dan bisa saja meningkat mengikuti kebutuhan masyarakat. Beras sebagai komoditas yang memberikan pengaruh besar terhadap ketahanan pangan menjadi komoditas pangan yang konsumsinya dan produksinya sangat masif. Berikut penjabarannya secara grafik.

Produksi and Konsumsi



²⁰ Jiuhardi, *Analisis Kebijakan Impor Beras terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia*, Vol.19 No.1, INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen, 2023, hal.108.

Gambar 2.1
Tabel Produksi dan Konsumsi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020-2023

Sumber: databooks, 2024

Data ini merupakan data produksi dan konsumsi beras giling (milled rice) yakni beras utuh atau beras yang sebagian kulitnya telah dipisahkan, dengan persentase kotoran/batu/gabah kurang dari 10%. Semenjak tahun 2020, jumlah beras yang diproduksi tidak pernah melebihi jumlah beras yang dikonsumsi. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan nasib beras Indonesia di masa depan. Saat produksi melimpah, harga beras berpotensi untuk turun yang menimbulkan kerugian petani sementara itu harga beras akan naik pada saat defisit yang menyebabkan kerugian pada konsumen akibatnya harga beras akan saling bergejolak sepanjang tahun (Prastowo, dkk; 2008: 13)²¹. Untuk mengatasi gap antara kedua hal yang saling bergejolak ini, pemerintah mengizinkan impor beras. Adapun negara pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India, Cina, dan Amerika Serikat.

Kebijakan penetapan bea masuk terhadap produk impor pangan telah membantu dalam mengamankan harga GKP. Kendati demikian, penetapan bea masuk tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap GKP dan HPP. Pada tahun 2023, harga GKP berada di atas HPP yang telah dipatok oleh pemerintah. Penyebabnya adalah anomali cuaca akibat gangguan pada atmosfer bumi, Hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah stok pangan, varietas gabah, kualitas hasil panen, kadar air dan kadar hampa serta peran para tengkulak.²²

	GKP (Gabah Kering Panen)	HPP (Harga Pembelian Pemerintah)
Januari	Rp5.972,72	Rp4.250,00
Februari	Rp5.855,95	Rp4.250,00
Maret	Rp5.402,60	Rp4.250,00
April	Rp5.523,9	Rp5.100,00
Mei	Rp5.731,97	Rp5.100,00
Juni	Rp5.672,51	Rp5.100,00

²¹ M.Zainul Abidin, *Dampak Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*, Vol 1 No.2, Sosio Informa, 2015, hlm.219.

²² Mus Purmadani, *Ini Penyebab Harga Gabah Melebihi HPP*, <https://radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2184170384/ini-penyebab-harga-gabah-melebihi-hpp?page=2>, diakses pada 11 April 2024.

Juli	Rp5.763,73	Rp5.100,00
Agustus	Rp5.979,31	Rp5.100,00
September	Rp6.681,94	Rp5.100,00
Oktober	Rp6.995,24	Rp5.100,00
November	Rp6.872,37	Rp5.100,00
Desember	Rp6.880,21	Rp5.100,00

Gambar 2.2

Tabel Perbandingan HPP dan NTP Sepanjang Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Serikat Petani Indonesia (SPI), organisasi massa petani di Indonesia menyampaikan bahwa fleksibilitas harga tidak sebanding dengan biaya usaha petani konvensional. Jika pembatasan HPP hanya dinaikkan sebesar Rp1.000/kg sehingga angka fleksibilitas gabah menjadi Rp 6.000, maka sama saja dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Serikat Petani Indonesia mengusulkan HPP dinaikkan menjadi Rp7.000 dan juga perbaikan kebijakan distribusi dan perdagangan beras yang akan melindungi petani dan konsumen.²³

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa impor pangan tidak selalu berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Langkah yang ditempuh pemerintah dalam melakukan impor bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan dan juga penawaran. ($Q_d=Q_s$). Q_d adalah jumlah yang diminta konsumen sedangkan Q_s adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Apabila $Q_d > Q_s$ maka harga akan mengalami lonjakan yang akan berdampak pada guncangan kestabilan subsektor pangan. Sebaliknya apabila $Q_d=Q_s$ maka harga akan stabil, inilah yang menjadi acuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan impor pangan. Namun kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia merupakan suatu kebijakan jangka pendek. Pemerintah berfokus menggunakan anggaran negara untuk impor dibandingkan

²³ Serikat Petani Indonesia, SPI: Naikkan HPP Gabah Bukan Hanya Sekadar Fleksibilitas, <https://spi.or.id/spi-naikkan-hpp-gabah-bukan-sekadar-fleksibilitas/>, diakses pada 11 April 2024.

menggunakannya untuk memberi insentif kepada petani di Indonesia²⁴. Kebutuhan pangan dalam negeri seharusnya dipenuhi oleh petani lokal, sesuai dengan cita-cita kemandirian pangan yang termaktub dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

KESIMPULAN

Sebagai negara agraris, sebagian besar masyarakat Indonesia bersandar pada sektor pertanian. Kendati demikian, Indonesia masih melakukan impor pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Perubahan iklim yang tidak dapat diatasi, tingginya peralihan fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor lain, serta belum optimalnya penggunaan pertanian modern merupakan alasan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin hari, kebutuhan masyarakat akan pangan semakin tinggi, namun sayangnya produksi pangan tidak dapat menyeimbangi kebutuhan masyarakat yang masif. Kebijakan impor pangan yang diambil oleh pemerintah berfungsi untuk menstabilkan harga di pasar dan memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi pangan domestik.

Selain memperhatikan kebutuhan masyarakat akan pangan, pemerintah juga berkewajiban untuk menaruh perhatian terhadap petani di Indonesia. Berdasarkan uraian yang dijelaskan sebelumnya, impor pangan memang berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan petani namun pengaruhnya tidak signifikan karena pada dasarnya impor pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi pangan lokal. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan impor yakni (1). pengenaan tarif impor (bea masuk), (2). penetapan kuota impor, dan (3). pemberian hak monopoli impor atau pembatasan terhadap jumlah importir. Hal ini dilakukan untuk melindungi sektor pertanian dan juga sektor ekonomi lainnya, agar tidak tersingkirkan oleh kegiatan impor. Tingkat kesejahteraan petani pada dasarnya tidak bisa diukur melalui impor pangan saja, faktor iklim, ketersediaan varietas, kualitas hasil, dan faktor lainnya berpengaruh dalam kesejahteraan petani.

Impor pangan merupakan kebijakan jangka pendek yang digunakan pemerintah untuk menekan harga dan memenuhi kebutuhan nasional, terutama pada hari-hari besar.

²⁴ Jiuhardi, *Analisis Kebijakan Impor Beras terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia*, Vol.19 No.1, INOVASI:Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen. 2023, hlm.107.

Untuk kebijakan jangka panjang, pemerintah harus memberikan kebijakan yang tepat dan efisien untuk mendorong produksi pangan lokal. Dengan begitu, cita-cita kemandirian dan kedaulatan pangan yang digagas dalam UU No 18 Tahun 2012 dapat terwujud dan ketergantungan negara akan impor pangan dapat ditekan jumlahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. (2015). Dampak Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 1(2), 213-230.
- Badan Pusat Statistik. (2023, 1 September). *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah Agustus 2023*. Diakses pada 10 April 2024, dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/09/01/1993/perkembangan-nilai-tukar-petani-dan-harga-produsen-gabah-agustus-2023.html> .
- Brida. (2023, 26 September). *Perubahan Iklim Mengancam Ketahanan Pangan*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://brida.badungkab.go.id/artikel/52693-perubahan-iklim-mengancam-ketahanan-pangan>.
- Carolina, Martha & Sirait, A.R. (2018). Pengaruh Impor Pangan terhadap Kesejahteraan Petani Pangan. *Jurnal BUDGET*, 3(2), 1-19.
- Fauzin. (2021). Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan. *Jurnal PAMATOR*, 14(1), 1-9.
- Jiuhardi. (2023). Analisis Kebijakan Impor Beras terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(1), 98-110.
- Kementerian Kominfo. (2023, 22 Mei). *Ketahanan Pangan Penting Menjadi Perhatian ASEAN*. Diakses pada tanggal 8 April 2024, dari <https://asean2023.id/id/news/food-security-an-aseans-priority#:~:text=Menurut%20data%20Global%20Food%20Security,yang%20tertinggi%20di%20Asia%20Tenggara>.
- Maulana, Arief. (2022, 9 Agustus). *Pakar Unpad: Transformasi Pertanian Indonesia Harus Berbasis Teknologi*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://www.unpad.ac.id/2022/08/pakar-unpad-transformasi-pertanian-indonesia-harus-berbasis-teknologi/>.
- Muhamad, Nabilah. (2023, 16 Juni). *Penduduk Bekerja Indonesia Didominasi oleh Pekerja Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan*. Diakses pada tanggal 5 April 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/16/penduduk-bekerja-indonesia-didominasi-oleh-pekerja-pertanian-kehutanan-dan-perikanan>.

- Majalah Hortus Archipelago. (2024, 7 Maret). *Mekanisasi Pertanian Indonesia Masih Rendah Ini Penyebabnya*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://news.majalahhortus.com/mekanisasi-pertanian-indonesia-masih-rendah-ini-penyebabnya/>.
- Putra, A.D.D. (2023, 2 Juni). *Membandingkan Sistem Pertanian di Jepang dan Indonesia*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://www.agrofarm.co.id/2023/06/membandingkan-sistem-pertanian-di-jepang-dan-indonesia/>.
- Purmadani, Mus. (2024, 17 Februari) *Ini Penyebab Harga Gabah Melebihi HPP*. Diakses pada 11 April 2024, dari <https://radarsurabayabisnis.jawapos.com/industri-perdagangan/2184170384/ini-penyebab-harga-gabah-melebihi-hpp?page=2>.
- Putri, A.M.H. (2023, 26 Januari). *Soal Ketahanan Pangan, Indonesia Berada di Urutan 69 Dunia!*. Diakses pada tanggal 8 April 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230126081433-128-408319/soal-ketahanan-pangan-indonesia-berada-di-urutan-69-dunia>.
- Putri, A.M.H. (2023, 19 September). *Digilas Tol & Bandara, Petani RI Makin Krisis Lahan*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230919081946-128-473563/digilas-tol-bandara-petani-ri-makin-krisis-lahan>.
- Rachman, Arrijal. (2023, 4 Desember). *Potret Pertanian RI 10 Tahun Terakhir Minim Teknologi*. Diakses pada 9 April 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231204120654-4-494316/potret-pertanian-ri-10-tahun-terakhir-minim-teknologi>. Diakses pada 9 April 2024
- Sabarella. dkk. (2022). *Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- SDGs Indonesia; Kementerian PPN/Bappenas. (2023) *SDGs Indonesia*. Diakses pada 8 April 2024, dari <https://sdgs.bappenas.go.id/>.
- Serikat Petani Indonesia. (2024, 4 April). *SPI: Naikkan HPP Gabah Bukan Hanya Sekadar Fleksibilitas*. Diakses pada 11 April 2024, dari <https://spi.or.id/spi-naikkan-hpp-gabah-bukan-sekadar-fleksibilitas/>.
- Simanjuntak, Martha Herlinawati. (2024, 19 Maret). *Ekonom: Kenaikan Harga Pangan Dorong Penurunan Daya Beli Masyarakat*. Diakses pada 8 April 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/4018110/ekonom-kenaikan-harga-pangan-dorong-penurunan-daya-beli-masyarakat>.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Zahrani, A.N., Abdad, S.A., & Bangsawan, M.I. *“Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Jalan Tol (Tax on Location) dalam Pengaruh Ekosistem Lingkungan Lingkup Hukum Agraria”*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023.